

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN
ILLEGAL LOGING DENGAN MELAKUKAN PENEBAANGAN
KAYU TANPA IZIN DI AREAL HUTAN PRODUKSI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2857 K/Pid.Sus-LH/2020)**

**ZENNUDDIN HERMAN^{*}
Dr.Mukidi,SH.,SE.,M..Hum^{**}
Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.^{***}**

ABSTRAK

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan.

Permasalahannya adalah Bagaimana pengaturan Perlindungan hutan dari upaya perusakan dalam peraturan perundang-undangan, Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas tindakan penebangan kayu tanpa izin di areal hutan produksi, Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan perusakan hutan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Pengaturan Perlindungan hutan dari upaya perusakan dalam peraturan perundang-undangan mencakup: Subsistem agribisnis hulu yakni industri-industri yang menghasilkan barang-barang modal bagi pertanian yakni industri pembenihan/pembibitan, industri agro kimia dan industri agro otomotif serta pendukungnya. Pertanggung jawaban pidana atas tindakan penebangan kayu tanpa izin di areal hutan produksi, tidak hanya berdasar pada Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e. Undang Undang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, Pertimbangan hakim atas tindakan perusakan hutan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020 bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dinyatakan ditolak

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Illegal Logging, Hutan Produksi.

^{*} Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

^{**} Dosen Pembimbing I Penulis Pada Penulisan Tesis Di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU

^{***} Dosen Pembimbing II Penulis Pada Penulisan Tesis Di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU

**CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ILLEGAL LOGGING ACTIONS BY CUTTING TREES WITHOUT A PERMIT IN PRODUCTION FOREST AREAS
(Case Study of the Supreme Court of the Republic of Indonesia
Decision Number 2857 K/Pid.Sus-LH/2020)**

ZENNUDDIN HERMAN*
Dr.Mukidi,SH.,SE.,M..Hum **
Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.***

ABSTRACT

Forest areas are open natural resources, so that public access to enter and utilize them is very large. This condition triggers problems in forest management.

The problem is How is the regulation of forest protection from destruction efforts in legislation, How is criminal liability for acts of logging without a permit in production forest areas, How is the judge's consideration of forest destruction in the Supreme Court decision Number 2857 K / Pid.Sus-LH / 2020

This research is descriptive with a normative legal approach. "The normative legal approach emphasizes legal science by emphasizing secondary data, to complete the data is done by collecting relevant materials and conducting literature studies which will then be analyzed legally.

It is concluded that the Regulation on Forest Protection from destruction efforts in the legislation includes: Upstream agribusiness subsystems, namely industries that produce capital goods for agriculture, namely the seed/nursery industry, the agro-chemical industry and the agro-automotive industry and its supporters. Criminal liability for acts of logging without a permit in production forest areas, is not only based on Article 83 paragraph (1) letter b in conjunction with Article 12 letter e. Law on Prevention and Eradication of Forest Destruction, Judge's consideration of acts of forest destruction in the Supreme Court decision Number 2857 K/Pid.Sus-LH/2020 that the *judex facti* decision in this case does not conflict with the law and/or laws, then the cassation application is declared rejected

Keywords: Accountability, Illegal Logging, Production Forest.